

Wacana Gaji tunggal (*Single Sallary*) Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Undang - undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS diatur tentang penggajian model baru PNS, dimana untuk penggajian PNS tidak lagi menggunakan standar gaji sebagaimana biasa. Sesuai dengan skema, Pemerintah bakal mengatur pemberlakuan sistem penggajian tunggal (*single salary*) untuk seluruh PNS. Skema dalam sistem penggajian tunggal untuk PNS adalah menghapus komponen tunjangan-tunjangan yang ada selama ini. Nantinya PNS hanya menerima gaji pokok, tetapi jumlahnya diperbesar. Dengan skema tersebut, tunjangan anak dan istri, tunjangan beras, dan tunjangan-tunjangan lainnya sudah dimasukkan semua menjadi komponen gaji pokok. Khusus untuk tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional, tetap diatur secara terpisah seperti saat ini. Pemberlakuan gaji tunggal (*single sallary*) ini diambil karena range atau selisih gaji pokok PNS ataran golongan terendah hingga tertinggi tidak terlalu jauh. Saat ini gaji pokok PNS berkisar antara Rp.1,5 juta per bulan hingga Rp.4,5 juta per bulan. Dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh tersebut, PNS tidak tergerak untuk meningkatkan kinerjanya sehingga bisa naik ke golongan selanjutnya.

Range yang ideal antara gaji PNS terendah hingga tertinggi minimal sepuluh kali lipat. Jika misalnya gaji yang terendah adalah Rp1,5 juta, berarti gaji tertinggi bisa sampai Rp15 juta. Usulan gaji tunggal ini pernah diungkapkan Wakil Ketua Tim Independen Komite Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Sofian Effendi pada saat pembahasan RUU ASN tahun 2014 lalu, bahwa sistem gaji tunggal itu ialah menggabungkan gaji dan tunjangan menjadi satu nomenklatur. Selain gaji dinaikkan sesuai dengan jenjang jabatan maka tunjangan akan diturunkan menjadi 10-15 persen dari gaji.

Gaji akan dihitung sesuai dengan beban kerja, bobot, jabatan dan capaian kinerja PNS, perhitungan gaji sangat erat kaitannya dengan penilaian kinerja dan kesejahteraan pegawai. Sistem penggajian pegawai yang disesuaikan dengan risiko pekerjaan yang dilakukan akan menciptakan sistem penggajian yang adil. Tidak hanya adil namun kriteria ini akan membuat para aparatur ini bersaing untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jika sistem penggajian tunggal (*single salary system*) akan diberlakukan bagi PNS maka sistem ini akan lebih 'memihak' aparatur karena berdasarkan kepada standar kelayakan hidup. Sistem penggajian tunggal ini mengakumulasi semua jenis pendapatan PNS.

Sistem ini didasarkan pada bobot atau grade (nilai) terhadap kinerja jabatan. Hal ini dinilai lebih baik dari sistem penggajian yang berlaku saat ini, kKarena sistem penggajian PNS saat ini terdiri dari jabatan, kinerja, grade dan step.

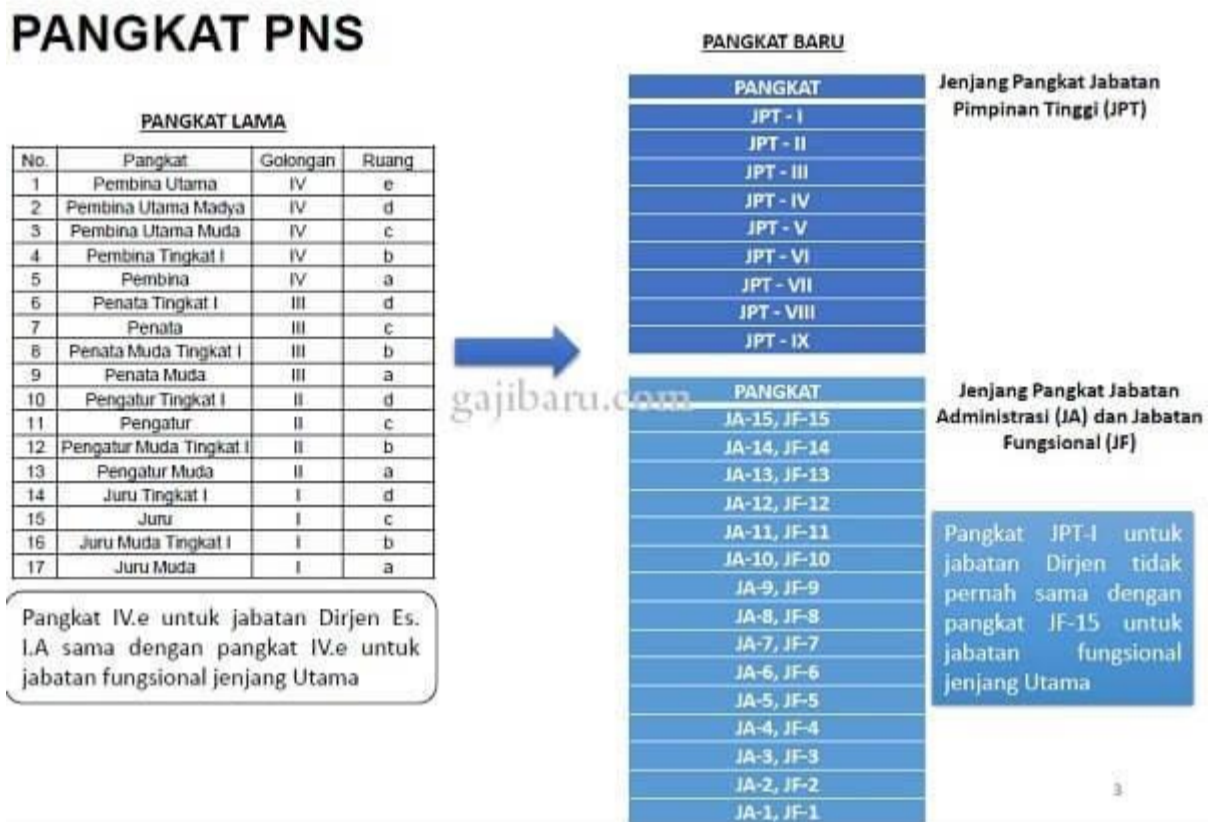
Dalam *single salary system*, total penghasilan PNS penilaiannya mulai dari grade 1 hingga grade 17 dan untuk golongan diistilahkan mulai dari step satu hingga step 10. Contohnya, untuk PNS golongan tertinggi yang masuk grade satu step 10, gaji bersih minimal sekira Rp.5,4 juta.

Sedangkan PNS yang menempati grade 17 di step yang sama, maksimalnya bakal menerima penghasilan bersih hingga Rp.57,2 juta.

Tiap grade dan step bakal meningkatkan besaran gaji dari hasil kinerja seorang abdi negara. Jadi sistem penggajian tidak lagi berdasarkan pangkat dan golongan, tetapi didasarkan pada bobot dan grade setiap PNS.

Untuk memahami sistem penggajian PNS yang baru, kita harus merubah mindset tentang tabel gaji, jenis tunjangan, dan penghasilan yang selama ini diterima oleh PNS.

Berikut perbedaan mendasar pangkat PNS yang lama dengan yang baru:



Sistem pangkat PNS yang lama masih menggunakan sistem sebagai berikut:

- Pangkat Juru Muda: Golongan I a.
- Pangkat Juru Muda Tingkat I: Golongan I b.
- Pangkat Juru: Golongan I c.
- Pangkat Juru Tingkat I: Golongan I d.
- Pangkat Pengatur Muda: Golongan II a.
- Pangkat Pengatur Muda Tingkat I: Golongan II b.
- Pangkat Pengatur: Golongan II c.
- Pangkat Pengatur Tingkat I: Golongan II d.
- Pangkat Penata Muda: Golongan III a.
- Pangkat Penata Muda Tingkat I: Golongan III b.
- Pangkat Penata: Golongan III c.
- Pangkat Penata Tingkat I: Golongan III d.

- Pangkat Pembina: Golongan IV a.
- Pangkat Pembina Tingkat I: Golongan IV b.
- Pangkat Pembina Utama Muda: Golongan IV c.
- Pangkat Pembina Utama Madya: Golongan IV d.
- Pangkat Pembina Utama: Golongan IV e.

Sedangkan sistem pangkat PNS yang baru berdasarkan RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS adalah, sebagai berikut:

#1. Jabatan Administrasi

- Jabatan **Pelaksana**: Pangkatnya adalah JA, JF-1 s.d. JA, JF-7
- Jabatan **Administrator dan Jabatan Pengawas**: JA, JF-5 s.d. JA, JF-15

#2. Jabatan Fungsional

- Jabatan Fungsional **Keterampilan**: JA, JF-2 s.d. JA, JF-9
- Jabatan Fungsional **Ahli**: JA, JF-5, JA, JF-7, JA, JF-9, dan JA, JF-11 s.d. JA, JF-15

#3. Jabatan Pimpinan Tinggi

- JPT **Pratama**: JPT-VI s.d. JPT-V
- JPT **Madya**: JPT-IV s.d. JPT-III
- JPT **Utama**: JPT-II s.d. JPT-I

Kalau digambarkan dalam tabel, berikut ini daftarnya:

Pangkat / Golongan Ruang (JA, JF)	Jabatan Fungsional Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama	Jabatan Fungsional Penyelia, Mahir, Terampil, dan Pemula	Jabatan Pelaksana	Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas	Jabatan Pimpinan Tinggi
JPT – I					JPT UTAMA
JPT – II					JPT UTAMA
JPT – III					JPT MADYA
JPT – IV					JPT MADYA
JPT – V					JPT PRATAMA
JPT – VI					JPT PRATAMA
JA, JF-15	JA, JF-15			JA, JF-15	
JA, JF-14	JA, JF-14			JA, JF-14	
JA, JF-13	JA, JF-13			JA, JF-13	
JA, JF-12	JA, JF-12			JA, JF-12	
JA, JF-11	JA, JF-11			JA, JF-11	
JA, JF-10				JA, JF-10	
JA, JF-9	JA, JF-9	JA, JF-9		JA, JF-9	
JA, JF-8		JA, JF-8		JA, JF-8	
JA, JF-7	JA, JF-7	JA, JF-7	JA, JF-7	JA, JF-7	
JA, JF-6		JA, JF-6	JA, JF-6	JA, JF-6	
JA, JF-5	JA, JF-5	JA, JF-5	JA, JF-5	JA, JF-5	
JA, JF-4		JA, JF-4	JA, JF-4		
JA, JF-3		JA, JF-3	JA, JF-3		
JA, JF-2		JA, JF-2	JA, JF-2		
JA, JF-1			JA, JF-1		

Pembagian pangkat baru PNS

Yang dimaksud dengan Jabatan administrasi terbagi 3 yakni administrator, Pengawas dan Pelaksana.

Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama. Sedangkan Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas: a. penyelia; b. mahir; c. terampil; dan d. pemula. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan

Yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:

- a. jabatan pimpinan tinggi utama;
- b. jabatan pimpinan tinggi madya;
- c. jabatan pimpinan tinggi pratama.

Jabatan Pimpinan Tinggi mempunyai tupoksi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui

- a. kepeloporan dalam bidang: 1. keahlian profesional; 2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan 3. kepemimpinan manajemen.
- b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan
- c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Seperti tabel gaji PNS yang baru sesuai UU ASN menurut versi *gajibaru.com*

RPP ttg Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas

TABEL INDEKS GAJI PNS JENJANG JPT	JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)	
	PANGKAT	INDEKS GAJI
	JPT - I	12.698
	JPT - II	12.094
	JPT - III	11.518
	JPT - IV	10.969
	JPT - V	10.447
	JPT - VI	9.950
	JPT - VII	9.476
	JPT - VIII	9.025
	JPT - IX	8.595

TABEL INDEKS GAJI PNS JENJANG JA DAN JF	JABATAN ADMINISTRASI (JA) DAN JABATAN FUNGSIONAL (JF)	
	PANGKAT	INDEKS GAJI
	JA-15, JF-15	7.162
	JA-14, JF-14	6.223
	JA-13, JF-13	5.406
	JA-12, JF-12	4.697
	JA-11, JF-11	4.081
	JA-10, JF-10	3.546
	JA-9, JF-9	3.080
	JA-8, JF-8	2.676
	JA-7, JF-7	2.325
	JA-6, JF-6	2.020
	JA-5, JF-5	1.755
	JA-4, JF-4	1.525
	JA-3, JF-3	1.325
	JA-2, JF-2	1.151
	JA-1, JF-1	1.000

Tabel Indeks Gaji

Tabel gaji dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tabel Indeks Gaji PNS jenjang **JPT** (Eselon II, Eselon I, dan Kepala Lembaga/Badan/LPNK) dengan Indeks Gaji **mulai dari 8,595 s.d. 12,698**.
2. Tabel Indeks Gaji PNS jenjang **Jabatan Administrasi** (pelaksana s.d. Eselon III) dan **Jabatan Fungsional** dengan indeks gaji **mulai dari 1,000 s.d. 7,162**. Sebagai gambaran, jika Gaji PNS pangkat JA-1 atau JF-1 sebesar Rp3.100.000,-, maka besaran gaji PNS pangkat:

- **JA-2, JF-2 = 1,151 x Rp3.100.000,- = Rp3.568.100,-.**
- **JA-3, JF-3 = 1,325 x 3.100.000,-**
- dan seterusnya

Dalam **RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS** telah dicantumkan nilainya sebagai berikut:

Perpres ttg Penetapan Penghasilan PNS

TABEL GAJI PNS JENJANG JPT	JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)	
	PANGKAT	GAJI (Rp)
	JPT - I	39,365,146
	JPT - II	37,490,615
	JPT - III	35,705,348
	JPT - IV	34,005,093
	JPT - V	32,385,803
	JPT - VI	30,843,622
	JPT - VII	29,374,878
	JPT - VIII	27,976,074
	JPT - IX	26,643,880

TABEL GAJI PNS JENJANG JA DAN JF	JABATAN ADMINISTRASI (JA) DAN JABATAN FUNGSIONAL (JF)	
	PANGKAT	GAJI (Rp)
	JA-15, JF-15	22,203,233
	JA-14, JF-14	19,290,385
	JA-13, JF-13	16,759,674
	JA-12, JF-12	14,560,968
	JA-11, JF-11	12,650,711
	JA-10, JF-10	10,991,061
	JA-9, JF-9	9,549,140
	JA-8, JF-8	8,296,386
	JA-7, JF-7	7,207,981
	JA-6, JF-6	6,262,364
	JA-5, JF-5	5,440,803
	JA-4, JF-4	4,727,022
	JA-3, JF-3	4,106,883
	JA-2, JF-2	3,568,100
	JA-1, JF-1	3,100,000

Sehingga gaji PNS dengan menggunakan sistem penggajian yang baru tidak lagi mengenal Gaji PNS Golongan II.c, II.d, Golongan III.a, IV.IV.b , IV.c dan seterusnya.

Sistem gaji baru ini gaji PNS pangkat JA-1, JF-1 dan seterusnya dengan menggunakan indeks seperti tabel di atas, dengan perbandingan gaji PNS terkecil dan terbesar adalah 1,000 : 12,698

Tunjangan kinerja PNS dalam RPP tentang Gaji, tunjangan , dan fasilitas PNS.

Besaran tunjangan kinerja PNS adalah sebesar 5% dari Gaji PNS dan sama pada setiap Instansi Pusat dan daerah.

Berikut ini gambaran tunjangan kinerja PNS dalam sistem penggajian PNS yang baru dengan menggunakan Tabel indeks gaji di atas :

JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)		
PANGKAT	GAJI (Rp)	TUNJANGAN KINERJA (Rp)
		5%
JPT - I	39,365,146	1,968,257
JPT - II	37,490,615	1,874,531
JPT - III	35,705,348	1,785,267
JPT - IV	34,005,093	1,700,255
JPT - V	32,385,803	1,619,290
JPT - VI	30,843,622	1,542,181
JPT - VII	29,374,878	1,468,744
JPT - VIII	27,976,074	1,398,804
JPT - IX	26,643,880	1,332,194

JABATAN ADMINISTRASI (JA) DAN JABATAN FUNGSIONAL (JF)		
PANGKAT	GAJI (Rp)	TUNJANGAN KINERJA (Rp)
		5%
JA-15, JF-15	22,203,233	1,110,162
JA-14, JF-14	19,290,385	964,519
JA-13, JF-13	16,759,674	837,984
JA-12, JF-12	14,560,968	728,048
JA-11, JF-11	12,650,711	632,536
JA-10, JF-10	10,991,061	549,553
JA-9, JF-9	9,549,140	477,457
JA-8, JF-8	8,296,386	414,819
JA-7, JF-7	7,207,981	360,399
JA-6, JF-6	6,262,364	313,118
JA-5, JF-5	5,440,803	272,040
JA-4, JF-4	4,727,022	236,351
JA-3, JF-3	4,106,883	205,344
JA-2, JF-2	3,568,100	178,405
JA-1, JF-1	3,100,000	155,000

(Tukin sistem penggajian baru)

Besaran tunjangan kinerja sebagaimana di atas, nilainya 5% dari Gaji, besaran tunjangan kinerja PNS ini akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden tentang Penghasilan PNS.

Untuk jabatan Administrasi dan jabatan fungsional terdapat kenaikan penghasilan, sebagai tabel dibawah ini :

JABATAN ADMINISTRASI (JA) DAN JABATAN FUNGSIONAL (JF)												
PANGKAT	INDEKS GAJI	TUNJANGAN KINERJA 5%	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
JA-15, JF-15	7.162	0.358	7.520	7.879	8.237	8.595	8.953	9.311	9.669	10.027	10.385	10.744
JA-14, JF-14	6.223	0.311	6.534	6.845	7.156	7.467	7.778	8.090	8.401	8.712	9.023	9.334
JA-13, JF-13	5.406	0.270	5.677	5.947	6.217	6.488	6.758	7.028	7.299	7.569	7.839	8.110
JA-12, JF-12	4.697	0.235	4.932	5.167	5.402	5.637	5.871	6.106	6.341	6.576	6.811	7.046
JA-11, JF-11	4.081	0.204	4.285	4.489	4.693	4.897	5.101	5.305	5.509	5.713	5.917	6.121
JA-10, JF-10	3.546	0.177	3.723	3.900	4.077	4.255	4.432	4.609	4.786	4.964	5.141	5.318
JA-9, JF-9	3.080	0.154	3.234	3.388	3.542	3.696	3.85	4.004	4.158	4.313	4.467	4.621
JA-8, JF-8	2.676	0.134	2.810	2.944	3.078	3.212	3.345	3.479	3.613	3.747	3.881	4.014
JA-7, JF-7	2.325	0.116	2.441	2.558	2.674	2.79	2.906	3.023	3.139	3.255	3.371	3.488
JA-6, JF-6	2.020	0.101	2.121	2.222	2.323	2.424	2.525	2.626	2.727	2.828	2.929	3.03
JA-5, JF-5	1.755	0.088	1.843	1.931	2.018	2.106	2.194	2.282	2.369	2.457	2.545	2.633
JA-4, JF-4	1.525	0.076	1.601	1.677	1.754	1.83	1.906	1.982	2.059	2.135	2.211	2.287
JA-3, JF-3	1.325	0.066	1.391	1.457	1.524	1.59	1.656	1.722	1.788	1.855	1.921	1.987
JA-2, JF-2	1.151	0.058	1.209	1.266	1.324	1.381	1.439	1.496	1.554	1.611	1.669	1.727
JA-1, JF-1	1.000	0.050	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500

Tabel kenaikan gaji PNS

- Kenaikan Penghasilan dari P1 ke P2 sampai P4 adalah 1 tahun berkinerja Baik atau Amat Baik.
- Kenaikan Penghasilan dari P4 ke P5 sampai P7 adalah 2 tahun berkinerja Baik atau Amat Baik.
- Kenaikan Penghasilan dari P1 ke P2 sampai P4 adalah 1 tahun berkinerja Baik atau Amat Baik.
- Kenaikan Penghasilan dari P7 ke P8 sampai P10 adalah 3 tahun berkinerja Baik atau Amat Baik.

Semua PNS Baik PNS Daerah maupun PNS Pusat mendapatkan Tunjangan Kinerja yang sama.

Tunjangan kemahalan PNS dalam RPP tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS

Tunjangan kemahalan PNS dihitung berdasarkan kolom indeks gaji dan tunjangan kinerja pada tabel indeks penghasilan yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing dibuat berdasarkan wilayah kemahalan daerah baik dalam negeri maupun luar negeri.

Besaran Tunjangan kemahalan PNS akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden tentang Penghasilan PNS.

Contoh indeks Harga per Provinsi:

No	Propinsi	Indeks Kemahalan Daerah Provinsi
1	Nanggroe Aceh D.	48.67
2	Sumatera Utara	27.15
3	Sumatera Barat	26.37
4	Riau	47.02
5	Kepulauan Riau	52.85
6	Jambi	33.80
7	Sumatera Selatan	54.81
8	Bangka Belitung	64.32
9	Bengkulu	12.63
10	Lampung	23.72
11	Jawa Barat	57.89
12	DKI Jakarta	117.54
13	Banten	25.19
14	Jawa Tengah	33.98
15	D.I. Yogyakarta	10.33
16	Jawa Timur	113.68
17	Bali	26.85

No	Propinsi	Indeks Kemahalan Daerah Provinsi
18	Nusa Tenggara Barat	4.21
19	Nusa Tenggara Timur	0.00
20	Kalimantan Barat	22.06
21	Kalimantan Selatan	46.32
22	Kalimantan Tengah	44.39
23	Kalimantan Timur	51.67
24	Maluku	24.56
25	Maluku Utara	17.98
26	Gorontalo	31.58
27	Sulawesi Utara	68.42
28	Sulawesi Tenggara	29.82
29	Sulawesi Tengah	17.19
30	Sulawesi Selatan	57.89
31	Sulawesi Barat	30.81
32	Papua	71.98
33	Papua Barat	56.98
34	Kalimantan Utara	52.66

Indeks harga untuk perhitungan tunjangan kemahalan

Total Gaji yang diterima PNS adalah = Gaji + Tunjangan Kinerja + Tunjangan Kemahalan
 Dari tabel indeks gaji dan contoh rupiah besaran gaji di atasm maka total gambaran besaran gaji PNS sesuai dengan RPP tentang Gaji, tunjangan dan fasilitas PNS dengan menggunakan indeks Kemahalan Jakarta, adalah sebagai berikut :

Gaji jabatan Pimpinan Tinggi di Prov. DKI Jakarta :

TABEL PENGHASILAN PNS
JENJANG JPT *gajibaru.com*
 Dengan Indeks Kemahalan Prov. DKI Jakarta, 117.54%

JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)				
PANGKAT	GAJI (Rp)	TUNJANGAN KINERJA (Rp)	TUNJANGAN KEMAHALAN (Rp)	PENGHASILAN (Rp)
		5%	117.54%	
JPT - I	33,650,850	1,682,543	41,530,870	76,864,263
JPT - II	32,048,429	1,602,421	39,553,210	73,204,060
JPT - III	30,522,313	1,526,116	37,669,723	69,718,152
JPT - IV	29,068,870	1,453,443	35,875,927	66,398,240
JPT - V	27,684,638	1,384,232	34,167,550	63,236,419
JPT - VI	26,366,322	1,318,316	32,540,523	60,225,161
JPT - VII	25,110,783	1,255,539	30,990,975	57,357,296
JPT - VIII	23,915,031	1,195,752	29,515,214	54,625,997
JPT - IX	22,776,220	1,138,811	28,109,728	52,024,759

gaji pimpinan tinggi

Besaran total penghasilan jika gaji jabatan IA-1, JF-1 sebesar Rp. 3.100.000,- untuk jabatan Pimpinan Tinggi di Jakarta adalah sebesar Rp. 52.024.759,- s/d Rp. 76.864.263,-

Gaji jabatan administrasi dan jabatan Fungsional :

TABEL PENGHASILAN PNS
JENJANG JA DAN JF *gajibaru.com*
 Dengan Indeks Kemahalan Prov. DKI Jakarta, 117.54%

JABATAN ADMINISTRASI (JA) DAN JABATAN FUNGSIONAL (JF)													
PANGKAT	GAJI (Rp)	TUNJANGAN KINERJA (Rp)	TUNJANGAN KEMAHALAN (Rp)	P1 (Rp)	P2 (Rp)	P3 (Rp)	P4 (Rp)	P5 (Rp)	P6 (Rp)	P7 (Rp)	P8 (Rp)	P9 (Rp)	P10 (Rp)
		5%	117.54%										
JA-15, JF-15	18,980,183	949,009	23,424,773	43,353,966	44,302,975	45,251,984	46,200,993	47,150,002	48,099,011	49,048,021	49,997,030	50,946,039	51,895,048
JA-14, JF-14	16,490,168	824,508	20,351,671	37,666,347	38,490,856	39,315,364	40,139,872	40,964,381	41,788,889	42,613,398	43,437,906	44,262,414	45,086,923
JA-13, JF-13	14,326,818	716,341	17,681,730	32,724,889	33,441,230	34,157,571	34,873,912	35,590,253	36,306,594	37,022,934	37,739,275	38,455,616	39,171,957
JA-12, JF-12	12,447,279	622,364	15,362,059	28,431,702	29,054,066	29,676,430	30,298,794	30,921,158	31,543,522	32,165,886	32,788,250	33,410,614	34,032,978
JA-11, JF-11	10,814,317	540,716	13,346,706	24,701,739	25,242,455	25,783,171	26,323,887	26,864,603	27,405,319	27,946,034	28,486,750	29,027,466	29,568,182
JA-10, JF-10	9,395,584	469,779	11,595,748	21,461,111	21,930,891	22,400,670	22,870,449	23,340,228	23,810,007	24,279,787	24,749,566	25,219,345	25,689,124
JA-9, JF-9	8,162,975	408,149	10,074,499	18,645,622	19,053,771	19,461,920	19,870,069	20,278,217	20,686,366	21,094,515	21,502,664	21,910,812	22,318,961
JA-8, JF-8	7,092,072	354,604	8,752,623	16,199,498	16,554,102	16,908,705	17,263,309	17,617,913	17,972,516	18,327,120	18,681,723	19,036,327	19,390,931
JA-7, JF-7	6,161,661	308,083	7,604,537	14,074,282	14,382,365	14,690,448	14,998,531	15,306,614	15,614,697	15,922,780	16,230,863	16,538,946	16,847,029
JA-6, JF-6	5,353,311	267,666	6,606,896	12,227,873	12,495,538	12,763,204	13,030,870	13,298,535	13,566,201	13,833,866	14,101,532	14,369,197	14,636,863
JA-5, JF-5	4,651,009	232,550	5,740,136	10,623,695	10,856,245	11,088,796	11,321,346	11,553,897	11,786,447	12,018,998	12,251,548	12,484,098	12,716,649
JA-4, JF-4	4,040,842	202,042	4,987,086	9,229,970	9,432,012	9,634,054	9,836,096	10,038,138	10,240,180	10,442,222	10,644,264	10,846,306	11,048,348
JA-3, JF-3	3,510,723	175,536	4,332,629	8,019,087	8,194,623	8,370,160	8,545,696	8,721,232	8,896,768	9,072,304	9,247,840	9,423,376	9,598,913
JA-2, JF-2	3,050,150	152,508	3,764,404	6,967,061	7,119,569	7,272,076	7,424,584	7,577,091	7,729,599	7,882,106	8,034,614	8,187,121	8,339,629
JA-1, JF-1	2,650,000	132,500	3,270,551	6,053,051	6,185,551	6,318,051	6,450,551	6,583,051	6,715,551	6,848,051	6,980,551	7,113,051	7,245,551

Gaji pejabat administrasi dan fungsional

Penerapan “single salary system” hingga kini masih dibahas pada lintas Kementerian, yakni, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), namun diharapkan akan dapat diterapkan mulai 1 Januari 2019 mendatang.